

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Mochamad Rizky Sulaiman

NPP. 32.0380

Asdaf Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0380@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Jatnika Dwi Asri, SE., M.Si., M.Ak

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Billboard tax in Bekasi Regency holds significant potential as a source of Local Own-Source Revenue (PAD), yet its realization remains suboptimal, contributing less than 1% to the total PAD. This issue is caused by the underutilization of the SIMPAD digital system, low taxpayer compliance, weak supervision, and insufficient outreach. **Objective:** This study aims to analyze the optimization of billboard tax revenue through the use of SIMPAD and to identify the obstacles and strategies employed to increase local revenue. **Method:** The research adopts a qualitative descriptive approach using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. Informants were selected purposively from internal Bapenda officials and billboard taxpayers. **Result:** The study reveals that SIMPAD contributes to the optimization of billboard tax revenue through: (1) expanding the taxpayer base by identifying 492 new tax objects, (2) improving the efficiency of tax assessment and collection, (3) enhancing data accuracy and supervision, (4) providing digital-based services, and (5) fostering inter-agency coordination. The main challenges include low digital literacy, lack of public outreach, and weak enforcement of tax sanctions. **Conclusion:** The optimization of billboard tax revenue through SIMPAD has shown positive results in terms of administrative efficiency, data transparency, and service delivery. However, improvements are still needed in human resources, public education, supervision, and system integration to further maximize PAD contribution. **Keywords:** Revenue Optimization, Billboard Tax, Local Revenue Management Information System (SIMPAD)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pajak reklame di Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun realisasi penerimaannya masih belum optimal dengan kontribusi kurang dari 1%. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan sistem digital SIMPAD, rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan minimnya sosialisasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui SIMPAD serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan PAD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dari pihak internal Bapenda dan wajib pajak reklame. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa SIMPAD membantu optimalisasi pajak reklame melalui: (1) perluasan basis pajak dengan penambahan 492 objek baru, (2) peningkatan efisiensi penilaian dan pemungutan, (3) perbaikan basis data dan pengawasan, (4) peningkatan layanan berbasis digital, serta (5) sinergi antarinstansi. Kendala utama mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya penegakan sanksi. **Kesimpulan:** Optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui SIMPAD telah menunjukkan hasil positif dalam efisiensi, transparansi, dan pelayanan, namun masih perlu perbaikan dari sisi SDM, edukasi, pengawasan, dan integrasi sistem agar kontribusi terhadap PAD dapat lebih maksimal.

Kata kunci: Optimalisasi Penerimaan, Pajak Reklame, Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi salah satu konsep yang dapat diandalkan dalam pembangunan, karena memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nasir, 2019). Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal keuangan daerah. Keuangan Daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai atau diukur dengan satuan uang, khususnya mencakup semua aset yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut (Sinurat, 2018). Salah satu pilar utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal, yang tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal. Pendapatan Asli Daerah menjadi instrumen penting untuk membiayai pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, peningkatan PAD bukan hanya sekadar target keuangan, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.

Menurut Halim (2007) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi besar adalah pajak daerah, termasuk di dalamnya pajak reklame. Pajak Reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame (Siahaan, 2010). Potensi pajak reklame cukup signifikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Kabupaten Bekasi. Sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota, Kabupaten Bekasi memiliki perkembangan kawasan industri, perumahan, dan pusat bisnis yang pesat, yang secara langsung mendorong meningkatnya aktivitas promosi dan pemasangan reklame. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber utama PAD.

Namun, pada kenyataannya, penerimaan dari sektor pajak reklame di Kabupaten Bekasi masih belum optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, meskipun target penerimaan pajak reklame sempat tercapai di beberapa tahun, tetapi secara umum kontribusinya terhadap total PAD masih tergolong kecil,

bahkan di bawah 1%. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya sistem pendataan, pengawasan, dan pemungutan pajak reklame di lapangan. Masih ditemukannya reklame liar tanpa izin, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta lemahnya pengawasan menjadi hambatan yang harus segera diatasi agar potensi pajak reklame dapat dimaksimalkan.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengambil langkah strategis melalui pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD). SIMPAD adalah sistem digital berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi, pendataan, pemantauan, hingga pembayaran pajak daerah, termasuk pajak reklame. Dengan adanya SIMPAD, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses layanan, dan meminimalisir praktik pungutan liar. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran secara mandiri (*self-assessment*) tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Meski demikian, penerapan SIMPAD juga tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa tantangan yang muncul antara lain kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem digital, terbatasnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia di instansi pengelola pajak. Akibatnya, meskipun sistem telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, tingkat efektivitasnya dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak reklame masih belum sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana SIMPAD berperan dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame, apa saja hambatan yang dihadapi, dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan strategis dan berkembang pesat. Namun, meskipun potensi pendapatan dari pajak reklame cukup besar, realisasi penerimaannya belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara potensi reklame yang tersebar di lapangan dengan data wajib pajak yang terdaftar dalam sistem.

Permasalahan utama di lapangan adalah belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) dalam mendukung pengelolaan pajak reklame secara efisien dan akurat. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain: kurangnya integrasi data antara instansi terkait, minimnya pemanfaatan teknologi oleh wajib pajak, serta lemahnya pengawasan terhadap reklame ilegal yang tidak berizin namun tetap beroperasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak reklame turut menjadi faktor penghambat optimalisasi penerimaan.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui pemanfaatan SIMPAD guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh (Novianti, 2023) menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pajak reklame di UPPRD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan metode kuantitatif melalui survei dan teknik simple random sampling, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas pelayanan. Sementara itu, penelitian (Junaedi, 2023) di Kota Bandung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa pemungutan pajak

reklame belum optimal karena adanya ketidakstabilan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga dibutuhkan peningkatan strategi pemungutan oleh Badan Pendapatan Daerah. Penelitian (Veronika, 2021) meneliti optimalisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Barito Timur dengan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum optimal akibat kurangnya pengawasan dan keterbatasan petugas, sehingga memengaruhi kontribusinya terhadap PAD. Selanjutnya, (Anjelika, 2022) meneliti pengaruh digitalisasi pajak melalui sistem e-registration, e-SPT, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem elektronik berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak secara nasional. Terakhir, penelitian (Pahlevi, 2023) di Kabupaten Morowali menyoroti optimalisasi pendapatan pajak reklame dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode induktif. Penelitian ini menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame sudah cukup baik, namun masih memiliki potensi peningkatan lebih lanjut untuk mendukung PAD. Seluruh penelitian tersebut menjadi acuan penting bagi penulis dalam memahami berbagai pendekatan optimalisasi penerimaan pajak, khususnya pajak reklame. Penelitian ini hadir dengan kebaruan melalui fokus pada digitalisasi pajak reklame melalui sistem SIMPAD di Kabupaten Bekasi, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui pemanfaatan aplikasi SIMPAD di Kabupaten Bekasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berbeda dengan penelitian Rizky Wahyu Novianti (2023) yang berfokus pada pengaruh digitalisasi terhadap kualitas pelayanan pajak reklame secara umum di Jakarta Selatan dengan pendekatan kuantitatif, maupun penelitian Achmat Junaedi (2023) dan Tegar Muhammad Syah Pahlevi (2023) yang meneliti optimalisasi pemungutan pajak reklame di daerah lain tanpa menyoroti aspek digitalisasi secara mendalam, penelitian ini justru menekankan peran teknologi digital khususnya aplikasi SIMPAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, objek penelitian ini juga memiliki kekhususan karena berfokus pada sistem digital milik daerah, yaitu SIMPAD, yang belum banyak dikaji secara ilmiah dalam konteks pajak reklame di Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur perpajakan daerah, khususnya mengenai integrasi digitalisasi dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui aplikasi SIMPAD di Kabupaten Bekasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame.

II. METODE

Pendekatan penelitian pada umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran yang menggabungkan keduanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dianggap paling sesuai untuk

mengungkap fenomena yang kompleks secara mendalam, khususnya dalam menganalisis optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui sistem digital SIMPAD di Kabupaten Bekasi. Pendekatan kualitatif mengacu pada kasus-kasus yang dipilih secara oportunistik atau purposif, dimana sering kali difokuskan pada individu, peristiwa, dan konteks tertentu, sehingga cocok dengan gaya analisis idiografis (Crowther & Lauesen, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara kontekstual dinamika pelaksanaan sistem SIMPAD, interaksi antar instansi, serta persepsi dan kepatuhan para wajib pajak. Selain itu, pendekatan kualitatif memberi fleksibilitas dalam menjelajahi berbagai hambatan dan strategi yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menjadikannya pilihan yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif. Penggunaan metodologi yang tidak tepat atau keliru dapat menyebabkan penelitian ditolak dan berpotensi menghasilkan informasi yang menyesatkan (Garg, 2016). Menurut Nurdin dan Hartati (2019), metode kualitatif kadang-kadang disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah. Metode ini juga dikenal sebagai metode etnografis dan awalnya digunakan dalam studi antropologi. Fokus utama penelitian ini, menurut Simangunsong (2017:192), adalah pada makna penelitian. Akibatnya, makna dalam penelitian kualitatif seringkali bersifat subjektif dan beragam, tergantung pada pengalaman masing-masing peserta. Sugiyono (dalam Ardiansyah et al., 2023) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif berbasis pada filsafat postpositivisme digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alamiah, bukan melalui eksperimen yang terkontrol secara ketat. Salah satu aspek terpenting dalam penelitian adalah penggunaan instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Menurut Bhaskar dan Manjuladevi (2016), alat penelitian seperti formulir observasi, formulir wawancara, dan kuesioner merupakan alat yang berguna untuk mengumpulkan data yang relevan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kompetensi, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan pajak reklame melalui sistem SIMPAD di Kabupaten Bekasi. Tujuan dari pemilihan informan ini adalah untuk memperoleh data yang mendalam dari berbagai perspektif, baik dari pihak penyusun kebijakan maupun pelaksana teknis di lapangan. Informan yang terlibat mencakup Kepala Badan Pendapatan Daerah, Sekretaris Bapenda, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, staf pengelola pajak, serta beberapa wajib pajak pengguna maupun non-pengguna aplikasi SIMPAD. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi sistem SIMPAD, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dijalankan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Memperluas Basis Penerimaan

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi menerapkan strategi memperluas basis penerimaan yang mengacu pada teori optimalisasi dari Sutedi (2008). Strategi ini dijabarkan ke dalam empat indikator utama:

a. Mengidentifikasi Pembayar Pajak

Dalam rangka memperkuat basis penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan langkah ekstensifikasi melalui pendataan wajib pajak baru, khususnya dari sektor pajak reklame. Pendataan ini tidak hanya mencakup wajib pajak yang sudah terdaftar, tetapi juga objek reklame baru yang belum tercatat namun memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak.

Melalui optimalisasi teknologi Geographic Information System (GIS) dan pemantauan langsung di lapangan, Bapenda berhasil mengidentifikasi potensi wajib pajak baru di beberapa pusat perbelanjaan besar seperti Summarecon Bekasi, Grand Metropolitan Mall, dan Mega Bekasi Hypermall. Hasilnya, ditemukan 492 potensi wajib pajak baru dengan total estimasi potensi pajak reklame mencapai Rp392.263.100.

Dengan adanya Temuan ini kita mengetahui strategi pemerintah dalam memperluas basis penerimaan pajak reklame, yang menunjukkan bahwa pendataan aktif dan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

b. Memperbaiki Penilaian Pajak

Upaya perluasan basis penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bekasi juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem penilaian pajak. Penilaian dilakukan dengan menetapkan nilai sewa reklame berdasarkan nilai jual dan lokasi strategis pemasangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2022.

Bapenda Kabupaten Bekasi juga telah melakukan digitalisasi sistem penilaian guna meningkatkan akurasi dan efisiensi. Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan dan database digital, proses penilaian menjadi lebih objektif, cepat, dan minim kesalahan dibandingkan metode manual sebelumnya.

Hal ini menjelaskan bagaimana strategi pemerintah dalam memperbaiki penilaian pajak sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak reklame, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak, serta meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

c. Memperbaiki Basis Data

Perbaikan basis data merupakan langkah strategis dalam memperluas dan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bekasi. Basis data yang akurat memastikan seluruh objek pajak tercatat dengan baik, sehingga tidak ada potensi penerimaan yang terlewat.

Menurut Bapenda Kabupaten Bekasi, data yang terintegrasi dan valid memungkinkan sistem mendeteksi ketidaksesuaian pembayaran, menekan potensi kebocoran penerimaan, dan meningkatkan pengawasan. Dengan demikian, pemungutan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan terkontrol.

d. Menghitung Kapasitas Penerimaan

Penghitungan kapasitas penerimaan merupakan upaya strategis untuk mengetahui potensi maksimal pajak reklame yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Langkah ini dilakukan melalui pendataan terhadap wajib pajak yang patuh maupun yang menunggak, guna menyusun strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah secara lebih akurat dan terukur.

Data piutang pajak reklame tahun 2024 menunjukkan total tunggakan sebesar Rp1.743.512.364, yang berasal dari berbagai perusahaan besar di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mencerminkan jumlah reklame yang terpasang.

Faktor penyebab tunggakan antara lain:

- Kurangnya pemahaman internal perusahaan terkait kewajiban administrasi pajak reklame.
- Sengketa data antara catatan perusahaan dan data Bapenda.
- Pengelolaan arus kas perusahaan yang menunda pembayaran pajak.
- Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, tingginya angka piutang dan berbagai faktor penyebab tunggakan mencerminkan perlunya peningkatan efektivitas dalam pengawasan, pemahaman regulasi oleh wajib pajak, serta penegakan sanksi yang konsisten, agar potensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bekasi dapat dimaksimalkan secara optimal.

3.2. Memperkuat proses pemungutan

Penguatan proses pemungutan menjadi salah satu cara untuk menunjang keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Memperkuat proses pemungutan terdiri dari dua indikator yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan dan meningkatkan sumber daya manusia. Berikut penjelasan indikator penguatan proses pemungutan:

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bekasi adalah rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan menyebabkan banyak warga yang abai, bahkan ada yang melakukan kecurangan atau tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hal ini berdampak langsung pada tidak maksimalnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Bapenda) terus berupaya meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan, seperti melalui penyuluhan terkait Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2022. Sistem SIMPAD juga dinilai efektif karena menghadirkan layanan pembayaran pajak yang transparan dan mudah diakses secara online, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemahaman dan kepatuhan masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi yang bersifat edukatif dan berkelanjutan, agar masyarakat memahami pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Strategi lain yang telah dilakukan Bapenda, seperti integrasi data SIMPAD dan kerja sama dengan Satpol PP dalam penertiban reklame ilegal, juga merupakan langkah tepat dalam mendukung peningkatan kepatuhan.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Lemahnya kompetensi aparatur di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pencapaian target penerimaan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan Bapenda, permasalahan utama terletak pada kurangnya pelatihan dan penguasaan teknologi oleh pegawai dalam mendukung sistem digital seperti SIMPAD. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan, pengolahan data, serta inovasi kebijakan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial menjadi sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Tanpa pembenahan ini, strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan inovasi layanan tidak akan berjalan secara efektif.

3.3. Meningkatkan Pengawasan

Proses pemungutan pajak reklame yang dilakukan perlu adanya pengawasan yang menjadi salah satu bentuk optimalisasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi. Indikator dari meningkatkan pengawasan menurut Sutedi (2008) yaitu memperbaiki proses pengawasan, pemberian sanksi terhadap penunggak pajak dan meningkatkan pelayanan. Berikut penjelasan dari indikator-indikator dalam meningkatkan pengawasan dari teori tersebut:

a. Memperbaiki Proses Pengawasan

Untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak reklame, Bapenda Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung, pengawasan dilakukan melalui integrasi data digital SIMPAD dengan sistem lain guna mendeteksi reklame yang belum terdaftar atau belum membayar pajak. Sedangkan pengawasan langsung dilakukan melalui kerja sama dengan Satpol PP untuk menindak reklame ilegal.

Langkah ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan sangat penting dalam meningkatkan akurasi data objek pajak, mengurangi pelanggaran, serta memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan pengawasan yang baik dan terpadu, maka potensi pendapatan daerah dari sektor pajak reklame dapat dimaksimalkan secara lebih efektif.

b. Pemberian Sanksi terhadap Penunggak Pajak

Salah satu langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bekasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame adalah dengan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang menunggak atau tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi yang diterapkan berupa denda administratif, surat teguran, hingga surat paksa, sesuai ketentuan peraturan daerah.

Apabila wajib pajak tetap tidak membayar, Bapenda bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban dan penurunan reklame ilegal. Tindakan ini dilakukan guna memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan, dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Langkah penegakan sanksi ini berperan penting dalam menjaga kedisiplinan pembayaran pajak, sekaligus mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

c. Peningkatan Pelayanan

Peningkatan kualitas pelayanan dalam sistem administrasi perpajakan menjadi faktor penting dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Bekasi. Melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD), Bapenda Kabupaten Bekasi berhasil menghadirkan layanan pembayaran, pelaporan, dan pendaftaran pajak secara online, yang memudahkan wajib pajak mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Selain itu, Bapenda juga menyediakan layanan konsultasi daring, memperluas sosialisasi melalui berbagai media, dan memperkuat koordinasi dengan Satpol PP untuk menindak reklame ilegal. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendorong kepatuhan wajib pajak serta mempercepat proses pelayanan publik.

Upaya peningkatan layanan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memberikan kemudahan akses dan kenyamanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame.

3.4. Menekan Biaya Pemungutan dan Meningkatkan Efisiensi

Salah satu dimensi dari optimalisasi yakni meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan menurut Adrian Sutedi (2008:10) dapat dilihat dari dua faktor yakni:

a. Memperbaiki Prosedur Administrasi Pajak

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelayanan, Bapenda Kabupaten Bekasi telah melakukan perbaikan prosedur administrasi perpajakan, khususnya pada pemungutan pajak reklame, melalui optimalisasi sistem SIMPAD. Perbaikan ini mencakup digitalisasi proses pendaftaran, penetapan, dan pembayaran, sehingga wajib pajak dapat mengakses layanan secara cepat, akurat, dan transparan.

SIMPAD juga telah dilengkapi dengan fitur pemantauan real-time dan notifikasi otomatis, yang membantu wajib pajak mengetahui status pembayaran dan mengingatkan jatuh tempo. Sistem ini mampu mengotomatisasi perhitungan pajak berdasarkan tarif dan durasi reklame, sehingga mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepastian hukum.

Meskipun sistem ini telah memberikan banyak kemudahan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami cara penggunaan SIMPAD secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif agar pemanfaatan sistem ini dapat menjangkau seluruh wajib pajak. Upaya perbaikan administrasi ini berperan penting

dalam menciptakan proses pemungutan pajak yang lebih praktis dan efisien, serta mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan PAD dari sektor pajak reklame.

b. Meningkatkan Efisiensi Pemungutan Pajak

Efisiensi dalam pemungutan pajak reklame menjadi salah satu fokus penting dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. Melalui implementasi SIMPAD, proses administrasi yang sebelumnya manual kini telah diotomatisasi, mencakup penetapan pajak, penghitungan tarif, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Menurut keterangan pejabat terkait, sistem ini mampu mengurangi potensi kesalahan, mempercepat proses, serta menyajikan data wajib pajak secara terintegrasi dan transparan, yang secara langsung mendukung kegiatan pemantauan dan penagihan.

Dengan berkurangnya biaya, waktu, dan sumber daya dalam proses pemungutan, SIMPAD telah berhasil meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Ke depan, yang diperlukan adalah menjaga stabilitas sistem dan meningkatkan kualitas layanan, agar efisiensi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang efektif

Indikator terakhir dalam teori optimalisasi menurut Sutedi (2008) adalah meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang matang dan koordinasi lintas instansi. Dalam konteks ini, Bapenda Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya strategis dengan menjalin kerja sama intensif bersama Satpol PP, DPMPTSP, dan Dinas PUPR.

Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat, pertukaran data, dan tugas lapangan bersama, guna memastikan bahwa proses perizinan, pemasangan, hingga pemungutan pajak reklame berjalan sesuai regulasi dan mendukung estetika tata ruang kota. Selain itu, sistem SIMPAD juga dimanfaatkan sebagai alat integrasi informasi yang mempercepat dan mempermudah komunikasi antarinstansi.

Bapenda juga telah merumuskan langkah-langkah perencanaan strategis, seperti pemetaan potensi pajak reklame, peningkatan pemanfaatan teknologi, serta program sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Dengan sinergi kelembagaan dan perencanaan yang terarah, kapasitas penerimaan pajak reklame dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa SIMPAD telah membantu optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bekasi, terutama dalam aspek efisiensi administrasi, transparansi data, dan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Akan tetapi, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan dalam pengawasan lapangan.

Sama halnya dengan temuan penelitian Rizky Wahyu Novianti (2022) yang menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan pajak reklame di UPPRD Kebayoran Baru, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan sistem digital seperti SIMPAD mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, berbeda dengan Novianti yang menggunakan metode kuantitatif dan fokus pada kualitas pelayanan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah bagaimana

SIMPAD berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan pajak reklame sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Anjelika (2022) yang menyimpulkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui e-registration dan e-filing dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini menambahkan dimensi baru, yaitu penggunaan sistem lokal seperti SIMPAD dalam konteks perpajakan daerah, yang belum banyak diteliti secara spesifik pada sektor pajak reklame.

Berbeda dengan penelitian Riska Riani Veronika (2021) yang meneliti optimalisasi pajak penerangan jalan dan menemukan bahwa realisasinya masih belum optimal karena lemahnya pengawasan dan kekurangan SDM, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pajak reklame di Kabupaten Bekasi, SIMPAD sudah mampu membantu proses pengawasan dan pemantauan secara lebih sistematis, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatannya secara menyeluruh.

Sementara itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Achmat Junaedi (2023) yang mengungkapkan adanya ketidakstabilan penerimaan pajak reklame di Kota Bandung. Namun berbeda dengan pendekatan Kota Bandung yang lebih manual, Kabupaten Bekasi telah mulai mengintegrasikan teknologi melalui SIMPAD. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik objek dan pendekatan teknologi antara dua daerah dapat memengaruhi efektivitas optimalisasi pajak reklame.

Temuan ini juga relevan dengan hasil penelitian Tegar Muhammad Syah Pahlevi (2023) di Kabupaten Morowali yang menyatakan bahwa pajak reklame memiliki potensi tinggi namun belum tergarap secara maksimal. Bedanya, penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis terhadap peran teknologi informasi sebagai alat bantu strategis, khususnya dalam upaya digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan PAD.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya literatur dan praktik kebijakan publik, khususnya dalam bidang perpajakan daerah dan pemanfaatan sistem informasi daerah seperti SIMPAD. Penelitian ini mengisi celah dari penelitian sebelumnya yang belum banyak menyoroti penggunaan sistem informasi lokal secara spesifik pada jenis pajak reklame. Lebih jauh, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi pajak melalui digitalisasi sangat tergantung pada faktor sosialisasi, literasi digital, serta komitmen kelembagaan dalam mengimplementasikan sistem tersebut secara berkelanjutan.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan tiga faktor utama yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui SIMPAD, yaitu literasi digital wajib pajak, sosialisasi sistem, dan integrasi kelembagaan. Hambatan muncul dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan SIMPAD, terbatasnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah daerah, serta kurangnya sinergi antara Bapenda dengan instansi pengawas reklame. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan intensitas edukasi publik, pelatihan penggunaan sistem bagi pelaku usaha, serta penguatan koordinasi antarinstansi melalui sistem berbasis data terpadu.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan Pajak Reklame melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD) di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMPAD telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi, transparansi data, serta kemudahan layanan bagi wajib pajak. Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan masih menghadapi

hambatan seperti rendahnya literasi digital wajib pajak, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya pengawasan terhadap reklame ilegal. Upaya strategis yang telah dilakukan antara lain memperluas basis penerimaan melalui pendataan objek pajak baru, memperbaiki sistem penilaian dan basis data, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, DPMPTSP, dan PUPR. Oleh karena itu, untuk mencapai penerimaan yang lebih optimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas edukasi dan sosialisasi SIMPAD, serta memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam memperoleh data dari seluruh lapisan wajib pajak pengguna maupun non-pengguna SIMPAD di Kabupaten Bekasi. Keterbatasan waktu, akses, dan ketersediaan informan dari sektor swasta menyebabkan cakupan wawancara belum dapat merepresentasikan keseluruhan populasi wajib pajak reklame secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas, mencakup evaluasi komprehensif terhadap efektivitas SIMPAD pada jenis pajak lainnya, seperti pajak restoran atau hotel, serta menganalisis integrasi sistem ini dalam skema transformasi digital pajak daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun secara nasional.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi beserta jajaran, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses pelaksanaan penelitian ini, baik dalam bentuk data, informasi, maupun arahan yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Anjelika, M. (2022). The Effect of Tax Digitization (Electronic System) on Increasing Taxpayer Compliance. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 747–764. <https://journal.y3a.org/index.php/mudima/index>
- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Bhaskar, S. B., & Manjuladevi, M. (2016). Methodology for research II. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 646–651. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190620>
- Crowther, D., & Lauesen, L. M. (2017). Qualitative methods. Handbook of Research Methods in Corporate Social Responsibility, 225–229. <https://doi.org/10.4324/9781315672632-5>
- Garg, R. (2016). Methodology for research I. *Indian Journal of Anaesthesia*, 60(9), 640–645. <https://doi.org/10.4103/0019-5049.190619>
- Junaedi, A. (2023). *OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT*.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Novianti. (2023). *PELAYANAN PAJAK REKLAME PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (UPPRD) WILAYAH THE EFFECT OF DIGITALIZATION ON THE QUALITY OF BILLBOARD TAX SERVICES AT THE REGIONAL TAX AND RETRIBUTION SERVICES UNIT IN THE REGION OF*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.
- Pahlevi, T. M. S. (2023). *OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MOROWALI*.
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Sinurat, M. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum pajak dan retribusi daerah*. Ghalia indonesia. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_pajak_dan_retribusi_daerah.html?id=10mxZwEACAAJ&redir_esc=y
- Veronika, R. R. (2021). *OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*. <https://doi.org/10.37304/jispar.v7i1.419>